**JURNAL**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**

**(Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Mataram)**

****

**Oleh:**

**IRSYAN ZULFIQRI**

**D1A012204**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**

**(Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Mataram)**

****

**Oleh:**

**IRSYAN ZULFIQRI**

**D1A012204**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**

**(Dr.Lalu Parman, SH.,M.Hum)**

**Nip: 19580408 198602 1 001**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2016**

**ABSTRAK**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

**PENCABULAN TERHADAP ANAK**

**(Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Mataram)**

**IRSYAN ZULFIQRI**

**D1A012204**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana pencabulan dan Penerapan sanksi pidana terhadap Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.MTR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak diatur dalam KUHP yang terdapat di dalam pasal 289 dan 290, diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 82, kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu dalam pasal 46. *Kedua,* Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.MTR dengan dakwaan alternatif, melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 289 KUHP, terdakwa terbukti melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dihukum dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan.

**Kata Kunci : Sanksi Pidana Pencabulan Anak**

**ABSTRACT**

 **APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST VIOLATION CRIME OF CHILDREN
(Studies of law decision Number 7 / Pid.Sus / 2015 / PN.Mataram)**

 **IRSYAN ZULFIQRI
D1A012204**

**FACULTY OF LAW MATARAM UNIVERSITY**

This study was aimed to assess the setting of violation crime and the applied of criminal sanctions refers to the law decision Number 7/Pid.Sus/2015/PN.MTR. This study used normative legal research methods, with the approach of Regulation Legislation, Conceptual Approach and Case Approach. The results of this study showed that: *First*, setting of violation crime of Children regulated in the Criminal Code contained in articles 289 and 290, is set also in act number 23 of 2002 were converted into act number 35 of 2014 about Protection of Children set in Article 82, then set also in Act No. 23 of 2003 about the Elimination of Domestic violence is in article 46. *Second*, Application of Criminal Sanctions against violation crime of Children in law decision number 7/Pid.Sus /2015/PN.MTR with alternative charges, in violation of Article 82 of Law Number 23 of 2002 about the Protection of Children or article 289 of criminal Code, the accused is proven to have violated Article 82 of Law No. 23 of 2002 on Protection of Children and punished with imprisonment for 3 (three) years and a fine of Rp.60.000.000,00 (sixty million rupiahs) subsidiary 2 (two) months in prison.

**Keywords: Criminal Sanction Chaild Abuse**

1. **PENDAHULUAN**

Perkembangan masyarakat akibat dari era globalisasi berdampak pada dunia kejahatan, sehingga masyarakat harus lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, terhadap siapapun dan terjadi dimanapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak-anak.

Kejahatan pada zaman ini semakin marak terutama kejahatan asusila seperti pencabulan, baik yang dilakukan oleh sesama dewasa maupun dengan anak-anak. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur nantinya akan menimbulkan dampak negatif terhadap psikologi maupun perkembangan yang lainnya. Dampak negatif terhadap psikologi pada anak akan membuat anak tersebut menjadi trauma yang berkepanjangan.

Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak seharusnya hakim memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek fisik maupun aspek psikis dari korban, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Rumusan masalah yang berkenaan dengan uraian tersebut adalah : 1. Bagaimanakah Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak? 2. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.MTR ? Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencabulan dan penerapan sanksi pidana pencabulan anak. Manfaat yang diharapkan dalam Penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya dibidang ilmu hukum pidana dan dapat memberikan manfaat dalam menganalisa putusan hakim dalam kasus Tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan yaitu :Pendekatan Perundang-Undangan *(Statute Aprroach)*, Pendekatan Konseptual *(Konseptual Aprroach)*, Pendekatan kasus (*Case Approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan :Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik atau cara pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka dengan mengadakan penelaahan kepustakaan*,* menelusuri, membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai literatur berupa peraturan Perundang-Undangan, pendapat para sarjana, dan para ahli hukum yang berdasarkan pengelompokan yang tepat, berkaitan dengan pokok permasalahan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penafsiran-penafsiran hukum yaitu: Penafsiran sistematis (*systematische interpratatie*), dan Penafsiran autentik. Dengan menggunakan berbagai penafsiran di atas, kemudian menghubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah, dan akhirnya menarik suatu kesimpulan yang disusun secara deduktif yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

1. **PEMBAHASAN**
2. **PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK**

Di dalam Undang-undang terdapat aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan anak khususnya terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam KUHP telah diatur beberpa jenis tindak pidana pencabulan, yaitu:

1. Pencabulan terhadap seorang wanita yang belum berumur 15 tahun

Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam pasal 289-290 KUHP yang berbunyi:

Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 290 ke-2

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin

Ke-3

Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

Selain diatur dalam KUHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

1. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyakm Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Selain Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KUHP, terdapat pula aturan yang mengatur tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual yaitu di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu dalam pasal 46 bahwa ”setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”

Adapun yang dimaksud dalam pasal 8 huruf a yaitu “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.”

1. **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.Mataram)**
2. Kasus Posisi

Pada hari Jumat tanggal 03 Oktober 2014 sekitar pukul 17.30 WITA dan bertempat di depan bekas Kantor Kehutanan di Dusun Kumbi Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa setelah selesai minum-minuman keras bersama saksi HERU dan BERI (dalam berkas terpisah) dan dalam perjalanan berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor bertemu dengan saksi JULI MULIANI alias JULI yang menggunakan sepeda motor seorang diri dan disaat itu terdakwa bersama saksi HERU dan BERI (dalam berkas terpisah) mengejar saksi JULI MULIANI alias JULI dan mendahului kemudian berhenti di pertigaan Kumbi didepan Kantor Kehutanan lalu terdakwa menunggu saksi JULI MULIANI alias JULI lewat jalan tersebut dan ketika saksi JULI MULIANI alias JULI datang, terdakwa langsung menghadang dan menghentikan sepeda motor saksi JULI MULIANI alias JULI sambil terdakwa berkata ”minta nomor hp nya Nia”, lalu dijawab saksi JULI MULIANI alias JULI ”tidak ada” lalu terdakwa tetap memaksa meminta nomor hp tetapi tidak ditanggapi oleh saksi JULI MULIANI alias JULI sehingga BERI (dalam berkas terpisah) mematikan sepeda motor saksi dan mencabut kunci sepeda motor lalu membuang kunci sepeda motor tersebut ke bawah, saat saksi mengambil kunci sepeda motor yang dijatuhkan, tangan kiri saksi JULI MULIANI alias JULI ditarik oleh terdakwa menggunakan tangan kanan dan ditepis oleh saksi JULI MULIANI alias JULI lalu terdakwa meremas payudara sebelah kiri saksi JULI MULIANI alias JULI dengan keras menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi JULI MULIANI alias JULI berkata ” kurang ajar” dan terdakwa kemudian marah lalu menampar pipi sebelah kiri saksi JULI MULIANI alias JULI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka selanjutnya terdakwa merayu saksi JULI MULIANI alias JULI dengan berkata ” saya suka sama kamu dari dulu” dan dijawab ”saya masih sekolah” dan ditanggapi terdakwa ” jangan gitu” sambil memegang kedua tangan saksi JULI MULIANI alias JULI yang sedang memegang stang kendaraan kemudian dari arah samping BERI (dalam berkas terpisah) langsung memegang leher saksi JULI MULIANI alias JULI sambil menarik hendak mencium saksi namun saksi dapat menghindar dengan cara menghentakkan kepala kebelakang sambil berkata ”eeh..ingat anak istrinya” dan mendengar perkataan saksi, BERI marah dan menampar pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa berkata ”saya rusak kamu sekarang Cuma kamu saja yang belum saya rusak” lalu saksi JULI MULIANI alias JULI berusaha melepaskan diri dan melarikan sepeda motornya namun terdakwa langsung meremas kembali payudara sebelah kiri saksi JULI MULIANI alias JULI sebanyak 1 (satu) kali dan menarik tangan kiri saksi sehingga saksi JULI MULIANI alias JULI terjatuh lalu saksi berusaha bangun dan lari sambil berteriak minta tolong dan bertemu dengan saksi DURHAMAN alias AMAQ ROH yang kebetulan sedang melintas di Jalan Dusun Kumbi.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut umum membuat dan menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu : Kesatu pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua pasal 289 KUHP.

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa SUDIRMAN alias SUDIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan tetap berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan;

1. Pertimbangan hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu : Kesatu : pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002; atau Kedua : pasal 289 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dan tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama, dengan pertimbangan yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

* Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami trauma;

 Hal-hal yang meringankan :

* Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
1. Putusan

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan.

1. Analisis Putusan

Tindak Pidana Merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau beberapa orang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat hukum. Apabila seseorang atau beberapa orang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan. Tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah mengarahkan seseorang untuk tidak mengulangi tindak pidana dikemudian hari (*Prevensi*). Selain itu Andi Hamzah juga menegaskan adanya dua macam *prevensi* yaitu *prevensi general* (umum) yang bertujuan agar setiap orang takut untuk melakukan tindak pidana (kejahatan) sedangkan *prevensi special* bertujuan untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera/takut untuk mengulang perbuatannya.[[1]](#footnote-2)

Sanksi-sanksi pidana pada umumnya didukung oleh berbagai macam teori. Teori-teori tersebut juga memberi alasan atau dasar dari penjatuhan hukuman yang membahas tentang pembenaran penjatuhan sanksi pidana terhadap seorang Terdakwa, diantaranya adalah teori imbalan (*absolute/vergeldingstheory*), teori maksud atau tujuan (*relatieve/doeltheory*) dan teori gabungan (*verenigingsteory*).

Menurut teori imbalan (*absolute/vergeldingstheory*), dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan. Dan yang selanjutnya adalah teori maksud atau tujuan (*relatieve/doeltheory*), menurut teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. Kemudian yang ketiga adalah teori gabungan (*verenigingsteory*), pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman/sanksi adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.[[2]](#footnote-3)

Maksud dan tujuan penjatuhan pidana yaitu untuk memperkuat nilai-nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan kapasitas fisik si pelaku dalam melakukan aksi berikutnya (*physical incapacitation of the convicted offenders*), rehabilitasi si pelaku, penangkalan terhadap si pelaku dari mengurangi perbuatannya (*specific deterrence*), dan berfungsi sebagai suatu contoh untuk menangkal orang lain dari melakukan perbuatan jahat yang dilakukan si pelaku (*general deterrence*), dan beberapa sanksi pidana lain seperti denda atau kompensasi bagi korban didesain untuk tujuan restorative.[[3]](#footnote-4)

Dalam kasus ini putusan hakim sesuai dengan apa yang ada dalam tuntutan jaksa penuntut umum dimana tuntutan jaksa terhadap terdakwa yaitu hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan yang diancam dengan pasal 82 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hakim memutus perkara tersebut dengan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikarenakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Hal itulah yang menjadi hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa dari ancaman hukuman maksimal, namun ada hal yang memberatkan terdakwa yang dijadikan pertimbangan oleh hakim yaitu perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami trauma, perbuatan terdakwa juga dapat merusak generasi muda dan terdakwa tidak mengaku terus terang atas perbuatannya.

Menurut pendapat penyusun bahwa hakim dalan memberikan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kepada terdakwa berdasarkan keyakinan dari hakim itu sendiri dimana dalam memutus perkara tersebut hakim melihat seluruh peristiwa-peristiwa yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim, sehingga hakim dapat menerapkan hukuman mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Unsur-unsur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu sebagai berikut:

* + - 1. Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik orang atau badan hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, di mana Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

* + - 1. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memori penjelasan *(memorie van Toelichting)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

* + - 1. Untuk melakukan perbuatan cabul;

Menurut R Soesilo yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan seterusnya.[[4]](#footnote-5)

**Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pertimbangan hakim**

Selain pertimbangan hakim yang berkaitan dengan hal yang memberatkan dan meringankan, hakim juga mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, kesalahan dibagi menjadi dua bagian yaitu kesengajaan dan kealpaan. Dalam kasus telah jelas bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja sehingga terpenuhilah unsur kesalahannya.

Dalam pertimbangannya, hakim juga memperhatikan bahwa tujuan dari pelaku melakukan hal tersebut kepada saksi korban adalah terdakwa ingin memperkosa saksi korban karena terdakwa sudah lama menyukai saksi korban sehingga terdakwa melakukan hal tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan sikap terdakwa setelah perbuatannya tersebut dilakukan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatannya, namun hakim tidak mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut telah dimaafkan oleh korban sebagai salah satu pertimbangannya.

Putusan hakim yang memutuskan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan merupakan pemberian pidana minimum yang ada dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sehingga menurut penyusun pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tidak sesuai atau harus lebih berat lagi dengan apa yang dilakukannya kepada korban dimana korban mengalami trauma atas kejadian tersebut.

1. **PENUTUP**

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana pencabulan anak diatur di dalam KUHP yaitu Pasal 289, 290. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 82 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 82 jo. Pasal 76E. Kemudian pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu dalam pasal 46.
2. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN.MTR, hakim memutus terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur di dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan terhadap terdakwa. Akhir penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyampaikan

Saran Yaitu, Para penegak hukum khususnya hakim dalam menindak para pelaku tindak pidana agar lebih maksimal sehingga membuat para pelaku jera, serta mengedepankan hak-hak anak sebagai korban dari tindak pidana pencabulan sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dianggap adil oleh korban dan seluruh elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Candra Septa, Jan Crijns et. all., *Hukum Dalam Perspektif,* Pustaka Larasan, Denpasar Bali, 2012

Dwi Yuwono Ismantoro. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan seksual terhadap anak*. Cet.pertama. Pustaka Yustita, Jakarta. 2015.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Marpaung Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Cet.ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

1. Peraturan Perundang-undangan

 Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*

Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

Indonesia*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

1. Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta,Jakarta, 2010. Hlm. 27 [↑](#footnote-ref-2)
2. Leden Marpaung*, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.105-107 [↑](#footnote-ref-3)
3. Septa Candra, Jan Crijns et. all., *Hukum Dalam Perspektif,* Pustaka Larasan, Denpasar Bali, 2012, hlm. 214 dan 215. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-5)